

DAFTAR ISI

JUDUL DISERTASI.....	i
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN.....	ii
MOTTO	iii
PERSEMBERAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
RINGKASAN DISERTASI.....	viii
DISSERTATION REVIEW.....	xxv
KATA PENGANTAR.....	xli
DAFTAR ISI	xliii
DAFTAR TABEL	l
DAFTAR GAMBAR.....	li
BAB. I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	15
1.5 Kerangka Teori Disertasi	15
1.5.1 Teori Keadilan	15
1.5.2 Teori Kemanfaatan Hukum.....	21

1.5.3 Teori Sistem Hukum	23
1.5.4 Teori Domein (Hak Menguasai)	26
1.6 Kerangka Konseptual Disertasi.....	35
1.6.1 Daerah Istimewa dalam NKRI.....	35
1.6.2 Konsep Negara Hukum	39
1.6.3 Konsep Rekonstruksi Terhadap Perundangan	50
1.7 Kerangka Pemikiran Disertasi.....	52
1.8 Metode Penelitian.....	53
1.8.1 Paradigma Penelitian.....	53
1.8.2 Pendekatan Penelitian	56
1.8.3 Spesifikasi Penelitian	57
1.8.4 Sumber Data Primer.....	57
1.8.5 Metode Pengumpulan Data.....	58
1.8.6 Metode Analisis Data.....	59
1.9 Orisinalitas Penelitian.....	60
1.10 Sistematika Penulisan Disertasi	62
BAB. II TINJAUAN PUSTAKA	64
2.1 Tinjauan Sistem Konstitusi dan Pemerintahan di Beberapa Negara.....	64
2.1.1 Peralihan Sistem Monarki Menjadi Demokrasi di Kerajaan Thailand	65
2.1.2 Sistem Pemerintahan dan Pembagian Kekuasaan di United States of America.....	68

2.1.3 Hubungan Konstitusional Hongkong dan Macau Terhadap Republik Rakyat China	71
2.2 Tinjauan Kewenangan Daerah Otonom Dalam Lingkup NegaraHukum	
76	
2.3 Tinjauan Hukum Terhadap Hak Menguasai Tanah Masa Kolonial	87
2.4 Tinjauan Hukum Terhadap Hak Menguasai oleh Sultan.....	93
2.5 Tinjauan Hukum Terhadap Hak Menguasai oleh Negara.....	100
2.6 Tinjauan Hukum Tanah dan Hak atas Tanah.....	104
2.6.1 Bentuk Hak Menguasai Negara atas Tanah	104
2.6.2 Makna dan Substansi Hak Menguasai Negara atas Tanah	108
2.6.3 Pengertian Hak atas Tanah.....	112
2.6.4 Macam-Macam Hak Atas Tanah	112
2.6.5 Hak Menguasai Negara	115
2.6.6 Hak Pengelolaan Tanah.....	117
2.7 Tinjauan Hukum Terhadap Tanah <i>Sultanaat Grond</i> (SG) dan <i>Paku Alamanaat Grond</i> (PAG).....	120
BAB. III KONSEPSI KEPEMILIKAN TANAH SULTANAAT GROND (SG)	
DAN PAKU ALAMANAAT GROND (PAG) DALAM KERANGKA HUKUM YANG BERKEADILAN DI DIY.....	122

3.1 Sejarah dan Perkembangan Kedudukan Pertanahan <i>Sultanat Grond</i> (SG) dan Paku Alamanat Grond (PAG) di Daerah Istimewa Yogyakarta	124
3.1.1 Pengelolaan <i>Sultanaat Grond</i> (SG) dan <i>Paku Alamanaat Grond</i> (PAG) Sebelum Bergabung Dengan NKRI.....	124

3.1.2 Pengelolaan Sultanan Grond (SG) dan Paku Alamanaat Grond (PAG) di DIY Setelah Bergabung dengan NKRI	129
3.2 Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai Perwujudan Otonomi Khusus... 3.3 Kajian Yuridis Terhadap Hukum Positif Sesuai Konsideran Mengingat di Dalam UU No. 13 Tahun 2012.....	134 141
3.3.1 Telaah UUD 1945 Pasal 5, 18, 18 A, 18 B dan Pasal 20.....	141
3.3.2 Telaah UU No. 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta.....	153
3.3.3 Telaah UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 163	
3.3.4 Telaah UU No. 22 Tahun 1948 Tentang Penetapan Aturan-aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Di Daerah-daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri	170
3.4 Pemahaman Secara Historis Yuridis Atas Hukum Positif Terhadap Kedaulatan Otonomi (Keistimewaan) Daerah Istimewa Yogyakarta 175	
3.5 Faktor Historis Yuridis Yang Mendasari Kepemilikan Tanah <i>Sultanaat Grond (SG)</i> dan <i>Paku Alamanaat Grond (PAG)</i>	187

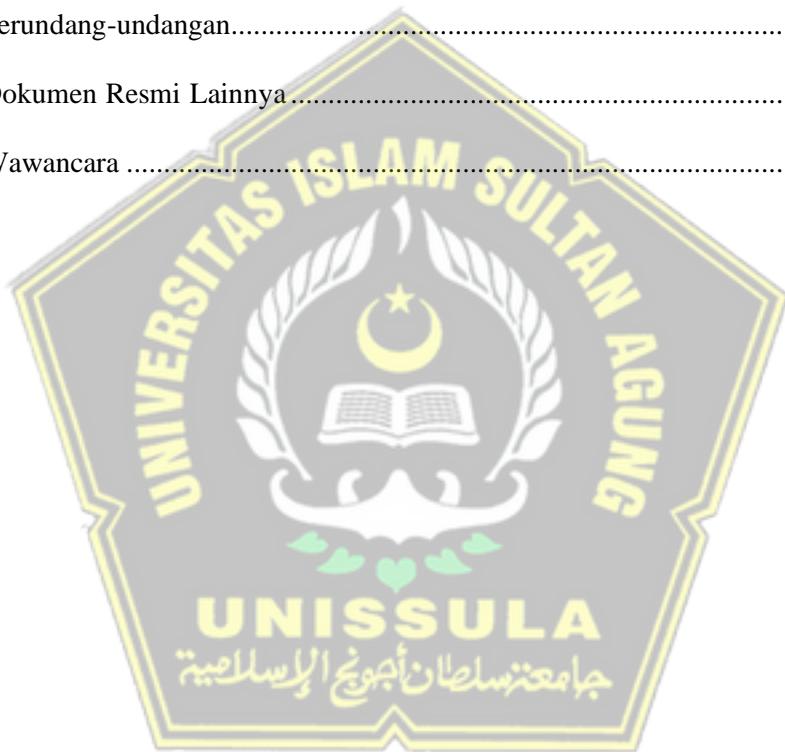
BAB. IV KELEMAHAN KEPEMILIKAN TANAH SULTANAAT GROND (SG) DAN PAKU ALAMANAAT GROND (PAG) DALAM KERANGKA UU NO. 13 TAHUN 2012.....190

4.1 Kedudukan <i>Sultanaat Grond (SG)</i> Dan <i>Paku Alamanaat Grond (PAG)</i> dalam Kerangka Hukum Nasional.....	190
4.2 Telaah UU No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria	193

4.2.1 Telaah Pasal 2 UU No.5 Tahun 1960	194
4.2.2 Telaah Pasal 3 Pasal 2 UU No.5 Tahun 1960	195
4.2.3 Telaah Pasal 4 UU No. 5 Tahun 1960	196
4.2.4 Telaah Pasal 5 UU No.5 Tahun 1960	197
4.2.5 Telaah Pasal 16 UU No. 5 Tahun 1960	198
4.2.6 Telaah Pasal 50 UU No.5 Tahun 1960	199
4.2.7 Telaah Pasal 56 UU No. 5 Tahun 1960	200
4.3 Telaah UU No.13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY	203
4.3.1 Telaah Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2).....	203
4.3.2 Telaah Pasal 1 Ayat (4) dan Ayat (5) UU No. 13 Tahun 2012...	204
4.3.3 Telaah Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 13 Tahun 2012.	205
4.3.4 Telaah Pasal 32 UU No. 13 Tahun 2012	206
4.3.5 Telaah Pasal 33 UU No.13 Tahun 2012	207
4.3.6 Telaah Pasal 50 UU No.13 Tahun 2012	208
4.4 Kelemahan Kepemilikan tanah <i>Sultanaat Grond (SG)</i> dan <i>Paku Alamanaat Grond</i> (PAG) dalam Kerangka UU No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY	209
BAB. V IDEALISASI TATA KELOLA KEPEMILIKAN SULTANAAT GROND (SG) DAN PAKU ALAMANAAT GROND (PAG) YANG BERKEADILAN DAN BERKEMANFAATAN BAGI MASYARAKAT DIY	216
5.1 Kerangka Kebijakan Kepemilikan Tanah Secara Nasional Dalam Lingkup	

NKRI.....	216
5.1.1 Implementasi Kebijakan Keistimewaan di Sektor Pertanahan DIY dalam Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia	219
5.1.2 Faktor-Faktor Yang Menghambat Kebijakan Pertanahan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Solusinya	227
5.2 Fakta Empirik Pengelolaan Tanah <i>Sultanaat Grond</i> (SG) dan <i>Paku Alamanaat Grond</i> (PAG) dalam Lingkup Internal DIY.....	230
5.2.1 Pola Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Saat Ini Berdasarkan Kebijakan Pertanahan Daerah Istimewa Yogyakarta.....	242
5.2.2 Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Sesuai dengan Penataan Ruang251	
5.2.3 Hambatan Pemanfaatan Ruang dan Penggunaan Tanah dalam Penataan Ruang	256
5.3 Kesesuaian Tata Kelola Tanah <i>Sultanaat Grond</i> (SG) dan <i>Paku Alamanaat Grond</i> (PAG) Dalam Norma Hukum Positif.....	257
5.4 Konsepsi Hukum Islam Mengenai Kepemilikan Bersama	273
5.5 Mewujudkan Tata Kelola Tanah <i>Sultanaat Grond</i> (SG) dan <i>Paku Alamanaat Grond</i> (PAG) yang Berkeadilan dan Berkemanfaatan bagi Masyarakat DIY.....	275
5.6 Usulan Rekonstruksi Terhadap Undang-undang No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	279

BAB. VI PENUTUP	290
6.1 Kesimpulan	290
6.2 Saran	292
6.3 Implikasi Kajian	293
DAFTAR PUSTAKA.....	295
Buku-buku	295
Jurnal dan Penelitian.....	305
Perundang-undangan.....	308
Dokumen Resmi Lainnya.....	310
Wawancara	310



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Orisinalitas Penelitian	60
Tabel 2 Periodisasi Pengaturan Pertanahan di DIY	96
Tabel 3 Matriks Kewenangan Otonomi DIY.....	139
Tabel 4 Luas tanah SULTANAAT GROND dan Paku Alam Grond di DIY	254
Tabel 5 Rincian Penguasaan dan Pemilikan Tanah Swapraja di DIY.....	254
Tabel 6 Status dan Tata Kelola Tanah Kasultanan-Kadipaten	270
Tabel 7 Matriks Usulan Rekonstruksi UU No. 13 Tahun 2012	280



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pemikiran Disertasi	53
Gambar 2 Bagan Hierarki Undang-Undang yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah.....	169

